

Siaran Pers

INDONESIA DEVELOPMENT FORUM 2018: TEROBOSAN DALAM MENGATASI KESENJANGAN DALAM TINGKAT REGIONAL

Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas, didukung Knowledge Sector Initiative, sebuah program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia, menggelar Indonesia Development Forum (IDF) 2018 pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta. IDF 2018 merupakan wadah diskusi bertaraf internasional untuk mendiskusikan isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia, sekaligus mencari solusi inovatif yang sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia. Pada tahun keduanya, IDF mengangkat tema “Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antarwilayah di Seluruh Nusantara” dan bertujuan untuk mewadahi pemerintah Indonesia, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan masyarakat secara umum untuk mengumpulkan perspektif pembangunan lintas-disiplin. Tema tersebut dijabarkan ke dalam tujuh subtema, yakni: (1) Pengembangan Pusat Pertumbuhan: Tantangan & Praktik Baik; (2) Upaya Mengurangi Kesenjangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan; (3) Perbaikan Pelayanan Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah; (4) Memanfaatkan Potensi Ekonomi Digital untuk Mendorong Pembangunan Daerah; (5) Penguatan Konektivitas Indonesia Sebagai Negara Kepulauan; (6) Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (7) Pengoptimalan Sumber Pendanaan Pembangunan. Penyelenggaraan IDF 2018 juga masih mengusung semangat tema IDF sebelumnya, yakni “Memerangi Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik”.

Tema yang diusung tahun ini juga sejalan dengan salah satu agenda Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, yaitu ‘membangun Indonesia dari pinggiran’ dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan. Pasalnya, Pemerintah Indonesia menyadari dampak dari kesenjangan antarwilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia. Bukti yang jelas terlihat adalah perbandingan pertumbuhan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur, serta pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan. Dalam IDF 2018, pemerintah Indonesia melibatkan diskusi intens antara pemerintah lokal, sektor swasta, masyarakat umum dan segenap mitra-mitra pembangunan untuk memperbaiki keterhubungan dan akses terhadap pelayanan dan kesempatan-kesempatan ekonomi di wilayah Timur Indonesia. “Kesenjangan antarwilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Pada IDF tahun ini, perangkat pemerintah, para peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, para pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pembangunan dapat saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antarwilayah dan mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengatasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Selain antarwilayah, ketimpangan terjadi antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak setara. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Paradoks ini diprediksi akan makin lebar pada masa mendatang sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar. Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan memperlemah suatu daerah, akibat dari pengurusan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal. Fenomena yang saat ini mengemuka di Indonesia, ketimpangan wilayah terjadi antarwilayah dan intrawilayah. Untuk mengatasinya, strategi yang selama ini diimplementasikan mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu, yaitu:

1. Pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan.
2. Pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan pedesaan, dan kota-kota sedang.
3. Pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.

Strategi tersebut dijalankan untuk mengatasi berbagai isu utama pembangunan yang menimbulkan ketimpangan wilayah di Indonesia, yang meliputi: (1) konektivitas dan aksesibilitas yang tidak merata; (2) pelayanan dasar yang tidak merata; (3) pemanfaatan sumber daya alam (SDA) lokal dalam pembangunan yang tidak optimal, yang juga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah; (4) tidak optimalnya pembangunan wilayah dengan keragaman kultur dan sosial budaya masyarakat; (5) kebijakan afirmasi dan pendanaan pembangunan yang kurang merata; (6) persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang tidak merata.

Ide-ide dan inovasi yang diajukan dalam IDF 2018 diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan solusi kebijakan berbasis bukti untuk menanggulangi permasalahan kesenjangan antarwilayah. Rekomendasi pembangunan yang dihasilkan IDF 2018 akan dikembangkan menjadi perencanaan matang yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh para pembuat kebijakan. Rekomendasi tersebut juga menjadi masukan penting bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. IDF 2018 menghadirkan lebih dari 250 pembicara bertaraf nasional dan internasional, lebih dari 95 makalah dan presentasi –yang telah diseleksi dari 580 peserta dari seluruh dunia– mengenai berbagai topik yang melingkupi pusat-pusat pertumbuhan, mempersempit celah di wilayah pinggiran, meningkatkan pelayanan mendasar, inovasi dalam pemerintahan lokal, pertumbuhan ekonomi digital, perbaikan konektivitas hingga optimalisasi sumber pendanaan pembangunan yang efektif dan inovatif.

“Kami yakin Indonesia Development Forum 2018 dapat menginspirasi lahirnya inisiatif-inisiatif baru untuk membantu mengatasi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Australia berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya tersebut dengan terus berkolaborasi bersama mitra-mitra kami di Indonesia dan lingkup internasional,” ujar Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan. Peserta IDF 2018 bertukar ide langsung dengan para ahli dan praktisi dalam sesi interaktif. Sesi “*Inspire*” menekankan pada praktik-praktik terbaik dari Indonesia dan negara-negara lainnya guna menemukan langkah-langkah terbaik dalam menanggulangi kesenjangan antarwilayah. Sesi “*Imagine*” mendorong para peserta untuk mengimajinasikan masa depan Indonesia yang lebih inklusif, progresif dan berkelanjutan, sesi “*Ideas and Innovations Marketplace*” akan menghadirkan solusi-solusi terbaru untuk menanggulangi berbagai tantangan pembangunan, sementara sesi “*Initiate*” membahas perencanaan dan strategi penanggulangan kesenjangan antarwilayah.

Jakarta, 10 Juli 2018

Thohir Afandi
Plt. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, Faks.: (021) 31901154
e-mail: humas@bappenas.go.id

Tim Komunikasi Indonesia Development Forum 2018

Syarifah Nur Aida	Ayesha Zulazmi
0822-1378-4876	0818-945-310
aida9088@yahoo.fr	Ayeshazulazmi.ksi@gmail.com

media@indonesiadevelopmentforum.com
www.indonesiadevelopmentforum.com

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan sejumlah fungsi, antara lain pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.

Indonesia Development Forum (IDF) 2018 - <https://indonesiadevelopmentforum.com/2018>

Sebuah platform untuk dialog nasional mengenai pembangunan. Diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta, IDF mempertemukan para pemimpin dari pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas solusi tantangan utama pembangunan Indonesia.

Knowledge Sector Initiative (KSI) - <http://www.ksi-indonesia.org/en/home>

Program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik yang lebih berkualitas, yang menggunakan penelitian, analisis, dan bukti secara lebih baik.